



Peran Guru PPKn Dalam Mewujudkan Misi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Di SMP Negeri 2 Sawan

Leonardus Ludir¹, Dewa Bagus Sanjaya², I Made Yudana³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : aldoleonard97@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : bugus.sanjaya@yahoo.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : i.made.yudana@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk: 1 Agustus 2020

Diterima: 23

September 2020

Terbit: 1 Oktober 2020

Keywords:

PPKn Teacher,
PPKn Vision and Mission,
Democracy.

Kata kunci:

Guru PPKn,
Visi Misi PPKn,
Demokrasi.

Corresponding Author:

Abstract

This study aims to describe (1) the role of PPKn teachers in realizing the mission of Pancasila and citizenship education as democratic education at SMPN 2 Sawan (2) the function as a manifestation of the development of democracy at SMPN 2 Sawan, in the research reveals the extracurricular role at SMPN 2 Sawan in realizing and implement the PPKn vision and mission as subjects that are focused on democratic values that will be implemented at SMPN 2 Sawan, what is the role of PPKn teachers in the mission of democratic education at SMPN 2 Sawan and also identify what things are done by teachers in building values the value of democracy at SMPN 2 Sawan. In this study, found several results that can be said to be good with several forms of research in the form of observation, interviews, documentation and questionnaires. In accordance with the reference to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the national education system which has been internalized and implemented is sufficient as mandated by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning 18 character values.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Peran guru PPKn dalam mewujudkan misi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi di SMPN 2 Sawan (2) fungsi sebagai perwujudan dalam pengembangan demokrasi di SMPN 2 Sawan, dalam penelitian mengungkapkan peranan ekstrakurikuler di SMPN 2 Sawan dalam mewujudkan dan menerapkan visi misi PPKn sebagai

aldoleonard97@gmail.com

mata pelajaran yang terfokus dalam nilai-nilai demokrasi yang akan diimplementasikan di SMPN 2 Sawan, bagaimana peran guru PPKn dalam misi pendidikan demokrasi di SMPN 2 Sawan dan juga mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dilakukan oleh guru dalam membangun nilai-nilai demokrasi di SMPN 2 Sawan. Dalam penelitian ini menemukan beberapa hasil yang dapat dikatakan baik dengan beberapa bentuk penelitian yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Sesuai dengan rujukan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah diinternalisasikan dan implementasikan sudah cukup seperti yang diamanatkan UU RI No 20 tahun 2003 tentang 18 nilai karakter.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Banyak kalangan menyatakan bahwa dewasa ini Indonesia telah menjadi salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia bersama dengan USA dan India. Secara konstitusional ini telah dinyatakan baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945. Pasal 1 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Upaya untuk melindungi kepentingan WNI (Adnyani, N.K.S, 2015 : 69). Penilaian seperti ini amat kuat mengkarakterisasi kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama setelah era reformasi dan demokratisasi di Indonesia pasca lengsernya pemerintahan demokrasi totaliter ala orde baru (Tim ICCE, 2003; Sukadi, 2006). Masyarakat Indonesia yang pluralistik ini juga menghendaki kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan (*bhinneka tunggal ika*). Melalui sistem dan mekanisme kehidupan demokratislah diyakini bahwa masyarakat Indonesia akan tetap dapat menghargai dan toleran terhadap berbagai perbedaan (suku, ras, agama, adat istiadat, stratifikasi sosial, klasifikasi dan segregasi sosial, bahasa, kesenian, jenis kelamin, asal daerah, dsb.) tetapi dapat memelihara tetap tegaknya NKRI.

Menurut Adnyani, N.K.S. (2016 : 30), *For the Indonesian government continues to boost economic growth in Indonesia in various fields for the sake of the public welfare*. Pancasila, serta jiwa modernisasi yang berbasis iptek menjadi landasan dan orientasi ideologisnya. Inilah yang kemudian diformulasikan menjadi sistem demokrasi Pancasila yang berpilar kecerdasan, kebijaksanaan, dan spiritualitas (Winataputra, 2005 ; Sukadi 2006).

Dengan demikian Demokrasi belum banyak dimaknai secara sosial budaya sebagai bentuk eksperimen kehidupan baik secara personal dan sosial yang menggunakan pilar kecerdasan, kebijaksanaan, spiritualitas, dan partisipasi aktif dalam melakukan perubahan dan pembangunan dalam masyarakat menuju kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan yang lebih baik dengan landasan nilai-nilai kearifan lokal, agama, Pancasila, dan UUD 1945. Tidak mengherankan kemudian jika banyak konflik kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang pemecahannya malah dapat mengikis keyakinan dan sikap masyarakat terhadap citra kehidupan demokrasi. Karena itulah tentu diperlukan

wahana pendidikan yang memungkinkan warga masyarakat dan warga negara belajar kehidupan demokratis baik yang bersifat formal maupun substansial. Di sinilah juga kemudian menjadi urgennya peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi di Indonesia (Tim ICCE, 2003; Winataputra, 2005 ; Sukadi 2006).

PKn memiliki misi sosio-paedagogis, sosio-akademis, dan sosio-kultural. Dalam misi sosio-paedagogis PKn berfungsi melaksanakan program pendidikan demokrasi dengan melibatkan aktivitas mengenal demokrasi, membangun demokrasi, dan melakukan demokrasi di dalam kelas. Melalui misi sosio-akademis PKn berfungsi menjadi wahana belajar bagi peserta didik untuk melakukan inkuiri, pembelajaran berbasis masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir evaluatif dan reflektif terhadap realitas kehidupan demokrasi dalam masyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Melalui misi sosio-kultural, akhirnya, PKn berfungsi menjadi wahana mengembangkan aktivitas demokrasi secara riil di dalam masyarakat melalui tindakan partisipatif sebagai aktor sosial terutama dalam upaya ikut merumuskan keputusan-keputusan kebijakan publik yang dapat disumbangkan dalam rangka proses rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Depdiknas, 2008 ; Sukadi 2006).

Mewujudkan PKn dalam misi Pendidikan Demokrasi seperti gambaran di atas secara aktual membutuhkan paling tidak empat komponen pokok. Pertama, pembelajaran PKn haruslah dapat mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator-indikator hasil belajar yang merujuk pada pengembangan kemampuan berdemokrasi peserta didik. Kedua, pembelajaran PKn sebagai konsekuensinya tentu memerlukan juga pokok-pokok materi yang terkait dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip demokrasi serta aplikasinya dalam kehidupan ketatanegaraan, tata pemerintahan, dan tata kemasyarakatan di Indonesia. Ini tidaklah berarti bahwa semua pokok materi di dalam PKn hanya membahas tentang konsep kehidupan demokrasi. Ketiga, pembelajaran PKn juga membutuhkan guru yang tidak saja memiliki pengetahuan dan wawasan luas tentang kehidupan demokrasi, tetapi juga haruslah memiliki nilai-nilai dan komitmen serta keterampilan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini penting karena guru adalah tauladan bagi peserta didik. Keempat, pembelajaran PKn itu sendiri haruslah menjadi wahana belajar kehidupan berdemokrasi secara riil bagi peserta didik. Ini artinya bahwa pembelajaran PKn mestilah menggunakan model, pendekatan, strategi, serta metode-metode pembelajaran yang berbasis dan berorientasi demokrasi. Penggunaan berbagai inovasi pembelajaran seperti CTL, problem-based learning, inquiry, cooperative learning, dan value analysis, debat publik, proyek atau praktik belajar kewarganegaraan, dan sejenisnya yang seluruhnya berbasis konstruktivisme sosial adalah penting dan harus diterapkan dalam pembelajaran PKn sebagai wahana Pendidikan Demokrasi. (Depdiknas, 2008 ; Sukadi 2006).

Dari misi diatas masalahnya adalah, apakah praktik PKn di sekolah , khususnya di SMPN 2 Sawan, sudah mengemban misi Pendidikan Demokrasi seperti di atas. Hasil studi pendahuluan memang menunjukkan bahwa pengajar atau pendidik PKn di Sekolah ini memang seluruhnya berasal dari jurusan PPKn. Diyakini, seluruh Guru PKn telah memiliki bekal minimal diklat dan kompetensi yang sama untuk mengemban praktik PKn dalam misi Pendidikan Demokrasi.

Tetapi, diketahui pula bahwa latar pendidikan tinggi para guru pengajar serta orientasi nilai dan komitmennya cukup bervariasi. Sampai saat ini belum ada upaya studi evaluasi tentang seberapa efektif misi pendidikan demokrasi telah diemban para Guru dalam menyelenggarakan pembelajaran PKn sebagai salah satu mata kuliah MPK. Penelitian ini diyakini menjadi sangat penting dilakukan oleh pusat penelitian Ideologi dan Demokrasi untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah SMPN 2 Sawan. Karena keterbatasan sumber daya, penelitian ini tidak dapat dilakukan secara utuh melalui studi evaluasi yang komprehensif tentang efektivitas pembelajaran PKn dalam mengemban misi pendidikan demokrasi di lingkungan SMPN 2 Sawan. Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada Guru serta Siswa MPN 2 Sawan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam misi Pendidikan Demokrasi.

PKn adalah satu-satunya mata ajar di dunia pendidikan formal yang tidak dapat lepas dari ikatan orientasi politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia, mata pelajaran ini kerap berganti nama dan isinya menyesuaikan dengan kehidupan politik yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun demikian tujuan PKn itu pada dasarnya selalu sama yaitu untuk membentuk warga negara yang baik sesuai dengan landasan ideologis dan konstitusional serta cita-cita politik kehidupan berbangsa dan bernegara (Mansoer, 2004 ; Sukadi 2006).

Pada masa orde baru, PKn yang diberi nama PMP-Kn dan kemudian menjadi PPKn telah menjadi alat kekuasaan politik untuk mengarahkan tujuan politik orde baru. Mata pelajaran PPKn saat itu tidak lebih sebagai pendidikan sosialisasi P4, karena ukuran warganegara yang baik saat itu ditentukan oleh seberapa besar setiap warga negara Indonesia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai P4 seperti yang sudah digariskan secara baku oleh sistem pemerintahan orde baru. Oleh karena itu mata pelajaran PPKn cenderung merupakan mata pelajaran yang bersifat sosialisasi normatif dari pada bersifat akademis. Tugas guru atau pendidik yang umumnya dipandang sebagai manggala P4 adalah membimbing peserta didik agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan benar seperti yang digariskan dalam P4. Sayangnya, karena para manggala pemerintahan yang cenderung melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan kurang demokratis yang berdampak buruk pada perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka P4 akhirnya dicabut dan berakhir pulalah masa pendidikan sosialisasi P4 tersebut dalam PPKn (Tim ICCE, 2003 ; Sukadi 2006).

Di era reformasi dan demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998, nama PPKn kemudian berubah menjadi PKn terutama sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Bersamaan dengan itu, para pakar dan praktisi PKn telah melakukan pengembangan paradigma baru PKn yang lebih relevan dengan cita-cita reformasi, demokrasi, dan masyarakat madani Indonesia. Dalam paradigma baru PKn ini dijelaskan bahwa PKn haruslah lebih bersifat akademis dan dapat membantu setiap insan warga negara Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat madani yang cerdas, lebih demokratis, dan berkeadilan sosial. Sehubungan dengan itu PKn lebih diarahkan sebagai bidang

kajian dan program pendidikan yang bersifat interdisiplin sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat interdisiplin, PKn pada hakikatnya juga adalah pendidikan politik dan pemerintahan; pendidikan hukum dan norma-norma; pendidikan ideologi bangsa dan negara; pendidikan nilai, moral, dan budi pekerti; dan pendidikan sosial pada umumnya (CICED, 1998, 1999a, 199b, 1999c, 1999d, 2000a, 2000b).

Sesuai dengan hakikat dan pengertian tersebut, visi PKn dikembangkan menjadi wahana Pendidikan tentang, melalui, dan untuk kewarganegaraan dan belajar demokrasi, dalam demokrasi, dan untuk demokrasi. Sebagai wahana pendidikan tentang, melalui, dan untuk kewarganegaraan, PKn berperan mendidik, mengajar, melatih, dan memberdayakan peserta didik tidak saja untuk memiliki konsep-konsep tentang kewarganegaraan, tetapi juga belajar melalui proses-proses kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik. Belajar tentang konsep-konsep kewarganegaraan dalam PKn berarti peserta didik akan belajar tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan; hukum dan norma-norma; ideologi bangsa dan negara; hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara; konsep-konsep nilai, moral, dan budi pekerti; dan konsep-konsep ilmu sosial pada umumnya. Belajar melalui proses-proses kewarganegaraan dalam PKn berarti peserta didik belajar menciptakan, mensimulasikan, mendemonstrasikan, dan memerankan kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam kelas sehingga dapat menjadikan peserta didik warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, dan partisipatif. Akhirnya, belajar untuk tujuan kewarganegaraan berarti peserta didik dididik dan diberdayakan untuk menjadi warga negara yang baik dalam arti memiliki kompetensi-kompetensi kewarganegaraan yang utuh meliputi: pengetahuan sipil, disposisi sipil (nilai-nilai dan sikap sipil), keterampilan sipil, kepercayaan sipil, komitmen sipil, kompetensi sipil, dan budaya sipil (CICED, Winataputra, 2001, 2005).

Dengan visi PKn yang kompleks sebagai wahana pendidikan demokrasi tersebut, PKn dikembangkan kemudian dengan misi yang kompleks pula. PKn ke depan haruslah terhindar dari hanya menjalankan misi sosialisasi politik bagi kepentingan politik penguasa saja. Karena itu, ada tiga misi yang harus diemban oleh PKn sebagai wahana pendidikan demokrasi, yaitu: misi sosio-paedagogis, misi sosio-akademis, dan misi sosio-kultural (Civitas International, 1998; CICED, 1999d; Winataputra, 2001, 2005 ; Sukadi, 2006).

Dengan misi sosio-paedagogis, PKn berkewajiban memberdayakan peserta didik melalui proses-proses pendidikan, pengajaran, dan pelatihan untuk memiliki tujuh kecakapan kewarganegaraan yang meliputi: *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, dan *civic culture* yang terintegrasi dalam kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia yang demokratis (Civitas International, 1998; CICED, 1999d; Winataputra, 2001, 2005 ; Sukadi, 2006).

Metode

Dengan misi sosio-akademis, selanjutnya, PKn haruslah dapat berfungsi bagi pendidik dan peserta didik untuk bersama-sama secara akademis mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik melalui berbagai kegiatan berpikir dan inkuiri

reflektif terhadap berbagai masalah demokrasi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn dalam hal ini hendaklah dapat menjadi sarana rekonstruksi sosial atau melakukan rekayasa sosial bagi pendidik dan peserta didik dalam menerapkan prinsip berpikir dan penelitian ilmiah terutama dalam menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi yang lebih baik sesuai dengan tahap-tahap perkembangan berpikir, sosial, emosional, dan moral peserta didik (Civitas International, 1998; CISED, 1999d; Winataputra, 2001, 2005 ; Sukadi, 2006).

Mengkaji prinsip-prinsip aturan yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang (Adnyani, N.K.S, 2014 : 36), lebih lanjut dilihat pada kenyataan sosial di masyarakat. Approach method in this research is empirical approach (Adnyani, N.K.S., 2017 : 244), dimana kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan secara faktual. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks konsep yaitu kesenjangan antara teori dan *action* (Adnyani, N.K.S., 2020 : 29).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan pendekatan Kasus (*case approach*) mencakup pemangku kepentingan (Purnamawati, I.G.A., Adnyani, N.K.S., 2000 : 143).

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjangkau data tentang bagaimanaperan guru terhadap pembelajaran PKn dalam misi pendidikan demokrasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah terstruktur dan mendalam. Wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Ada tiga aspek yang digunakan sebagai *blueprint* dalam penyusunan pedoman wawancara terstruktur, yaitu aspek misi *learning to know demecracy* yang menekankan aspek pokok-pokok materi demokrasi yang dibahas selama proses pembelajaran. Kedua, misi *learning in democracy* yang menekankan penciptaan lingkungan, iklim, dan nuansa demokrasi di dalam kelas melalui penerapan model pembelajaran yang berbasis dan berorientasi pada nilai-nilai dan aktualisasi demokrasi dalam pembelajaran. Ketiga adalah misi *learning for democracy* yang menekankan kemampuan mengembangkan gagasan, komitmen, dan partisipasi untuk pemecahan masalah-masalah demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek ini juga menekankan keyakinan siswa dalam pengembangan berbagai keterampilan sosial berdemokrasi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasar Pancasila and UUD 1945.

Wawancara juga digunakan untuk menjangkau data tentang guru apakah pembelajaran PKn sudah membantu siswa merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran demokrasi berbasis kompetensi secara utuh. Untuk ini siswa diminta memberikan informasi yang mendalam apakah dalam pembelajaran tujuan-tujuan belajar tentang kehidupan demokrasi telah dirumuskan dalam bahasa kompetensi hasil belajar yang utuh yang mencakup domain kognisi, afeksi, dan *social skills*. Melalui wawancara ini juga siswa diminta penilaiannya tentang apakah pelaksanaan pembelajaran PKn di kelas sudah menerapkan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran dan penilaian yang berbasis dan berorientasi demokrasi.

Pendalaman akan dilakukan pada kemampuan mahasiswa menjelaskan kriteria-kriteria sebuah pembelajaran PKn sudah menggunakan model atau pendekatan yang demokratis.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan model *Miles and Huberman*, yaitu (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Upaya penggalan, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas situs (Adnyani, N.K.S., 2016 : 50).

Hasil dan Pembahasan

Peran Guru dalam mewujudkan misi PKn sebagai Pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan.

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar yang melibatkan seorang pendidik untuk menyalurkan segala pengetahuan yang dibangun melewati bangku perkuliahan. Guru sebagai pemegang peranan utama dalam pembelajaran diharapkan dapat memilih baik metode maupun media pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Adapun masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah sebagai mana yang di kaji dalam penelitian Zuchdi dkk, (2011) mengidentifikasi salah satu masalah yang sering di temukan dalam konteks institusional sekolah masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, hal ini dikarenakan adanya sekolah yang suasananya yang kurang tertib, tidak ada kebebasan dalam berperilaku, kurangnya atauran sekolah yang memadai, kompetitif, individualistik, saling iri, berorientasi pada prestise, kurang mandiri, penataran nilai tidak teratur, mekanistik, kepemimpinan yang kurang peduli akan implementasi nilai-nilai karakter kepada siswa.

Inovasi dari penelitian ini adalah inovasi dalam perumusan kebijakan di level desa adat di Bali (Adnyani, N.K.S., 2016 : 67). Peran Guru dalam mewujudkan PPKn sebagai misi pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan. Keterlibatan guru PPKn dalam mewujudkan misi PPKn sebagai pendidikan demokrasi disekolah sudah sangat jelas dalam membangun sikap demokratis siswa, dalam membangun sikap demokratis tidaklah mudah jika dilakukan hanya oleh beberapa guru saja, tetapi semua guru harus dilibatkan dalam hal ini. Selain itu dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas, guru dan pihak sekolah harus bekerja ekstra dalam membangun sikap demokratis baik melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas seperti contoh intrakulikuler “PBM”, dalam materi pelajaran PPKn membahas tentang system pemerintahan.

Adapun Analisis yang dapat penulis dalam hasil wawancara di SMPN 2 Sawan adalah sebagai berikut.

Ekstrakulikuler “OSIS, PMR, Pramuka, Literasi, seni tari, paskibra dan kegiatan olahraga lainnya. Pentingnya dilakukan penelitian ini, bahwa peneliti menilai ada pembalikan cara berpikir di kalangan akademisi (Adnyani, N.K.S, 2019 : 73). Dalam hal ini sekolah juga melibatkan semua guru dalam membangun sikap demokratis siswa di sekolah. Baik itu melalui mata pelajaran maupun melalui kegiatan-kegiatan

sekolah yang diadakan di sekolah selain itu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sekolah juga sangat membantu guru sendiri dalam membangun sikap demokratis.

Adapun dengan hasil data yang penulis dapati melalui angket yang di sebar kepada siswa SMAN 1 Sawan sebagai berikut:

siswa	soal	rerata Skor	Nilai
20	10	40,2	80,4

Berdasarkan hasil analisis dan hasil angket di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran Guru dalam mewujudkan PPKn sebagai misi pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan sudah berjalan dengan baik dengan data yang menunjukkan angka rerata 80 dengan hal ini dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat membatu dalam proses penddikan demokrasi kepada siswa di SMPN 2 Sawan. Nilai-nilai ini akan termanifestasi dari pikiran, sikap, dan perilaku peserta didik dalam memandang, mengelola kelas (Adnyani, N.K.S., 2016 : 866).

Dengan perkembangan zaman masyarakat adat menganggap sepel mengenai tentang adat teruta mengenai tanah ulayat atau suku. Jika tanah ulayat atau tanah tersebut menjual atas nama pribadi tandapa sepengetahuan dari otoritas adat atau minta izizn dari *tu'a golo* serta warga setempat. Maka dari itu sebabnya melanggar aturan yang telah ditentuka oleh otoritas adat .maka dari itu jika sudah dialihkan haknya ke suku lain pihak yang menjual tanah tersebut akan menerima sanksi dari kekuasaan otoritas adat berupa babi besar (*ela wase lima*). Aturan ini di berikan ole nenek moyang terlebih dahulu .

Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Guru PKn dalam mewujudkan misi PPKn sebagai Pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan.

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar yang melibatkan seorang pendidik untuk menyalurkan segala pengetahuan yang dibangun melewati bangku perkuliahan. Guru sebagai pemegang peranan utama dalam pembelajaran diharapkan dapat memilih baik metode maupun media pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Undang-Undang Sistem Pedidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Adapun maslah-masalah yang sering terjadi di sekolah sebagai mana yang di kaji dalam penelitian

Zuchdi dkk, (2011) mengidentifikasikan salah satu masalah yang sering di temukan dalam konteks institusional sekolah masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, hal ini dikarenakan adanya sekolah yang suasananya yang kurang tertib, tidak ada kebebasan dalam berperilaku, kurangnya atauran sekolah yang memadai, kompetitif, individualistik, saling iri, berorientasi pada prestise, kurang mandiri, penataran nilai tidak teratur, mekanistik, kepemimpinan yang kurang peduli akan implementasi nilai-nilai karakter kepada siswa.

1. Guru Sebagai Pendidik
2. Guru Sebagai Pengajar
3. Guru Sebagai Pembimbing
4. Guru Sebagai Pelatih
5. Guru Sebagai Penasehat
6. Guru Sebagai Model dan Teladan
7. Guru Sebagai Pribadi
8. Guru Sebagai Pribadi
9. Guru Sebagai Peneliti
10. Guru Sebagai Pendorong Kreatifitas
11. Guru Sebagai Pembangkit Pandangan
12. Guru Sebagai Pekerja Rutin
13. Guru Sebagai Pembawa Cerita
14. Guru Sebagai Aktor
15. Guru Sebagai Emansipator
16. Guru Sebagai Evaluator
17. Guru Sebagai Pengawet
18. Guru Sebagai Kulminator

Berdasarkan hasil analisis dan hasil angket diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran serta hal-hal apa saja yang dilakukan Guru dalam mewujudkan PPKn sebagai misi Pendidikan Demokrasi di SMPN 2 Sawan sudah berjalan dengan baik dengan data yang menunjukkan angka rerata 81 dengan hal ini dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat membatu dalam proses penddikan demokrasi kepada siswa di SMPN 2 Sawan. Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung efektifitas keberlakuannya (Adnyani, N.K.S., 2016 : 143).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dengan judul Peran Guru PPKn dalam mewujudkan Misi PPKn Sebagai Pendidikan Demokrasi di SMP negeri 2 Sawan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Dalam mengemban serta mewujudkan pendidikan demokrasi di SMPN 2 Sawan sudah berjalan dengan baik, Peran guru dalam mengemban misi PPKn sebagai pendidikan demokrasi dimulai dengan arahan serta pembiasaan yang dilakukan oleh guru sehingga nantinya siswa akan mengikuti pembiasaan yang ada di SMPN 2 Sawan. Upaya yang dilakukan guru adalah dengan memberikan (teladan) contoh yang nantinya dapat dicontoh oleh siswa. Sehingga guru bukan

sebagai pentransfer ilmu saja tetapi juga sebagai contoh dan motivator agar siswa melakukan pembiasaan yang ada di sekolah. hal ini senada dengan apa yang di katakan kepala sekolah bahwasanya dari pihak sekolah memang sangat memperhatikan dan menggalakkan program ataupun kebiasaan-kebiasan yang memberikan pengaruh terhadap karakter anak, baik itu didalam kelas yang tentunya berkaitan erat dengan guru pengajar yang mempunyai pedoman mengajar SILABUS dan RPP ataupun di ruang lingkup SMPN 2 Sawan secara umum yang besar kaitannya dengan kebijakan sekolah atau program-program yang ada.

. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan menitik beratkan pada moral, diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap tuhan yang maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatas melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru pendidikan kewarganegaraan mengatakan bahwa pembelajaran pelaksanaan pengajaran tentang pengembangan nilai moral siswa “Aktivitas siswa ketika diberikan arahan serta dorongan untuk belajar secara teratur sudah cukup baik ini terlihat dari antusiasnya siswa dalam belajar khususnya pada materi demokrasi ini dimana siswa rajin bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan, serta dalam beraktifitas dikelas siswa berperilaku dengan baik sesuai nilai moral yang ditanamkan kepada siswa.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam mewujudkan misi PPKn sebagai pendidikan demokrasi disekolah pada siswa khususnya pembinaan perilaku dapat terlaksana dengan baik. Menurut pendapat beberapa siswa yang saya wawancarai wawancara pada tanggal 3 agustus 2020 mengenai peran guru dalam pelaksanaan pengajaran mata pelajaran PPKn mengatakan bahwa, aktivitas kami ketika diberikan pemahaman tentang demokrasi adalah berusaha dengan baik memahami dan menerapkan sesuai dengan arahan guru.

Dengan hasil tes data yang penulis dapati menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rerata secara keseluruhan dari soal yang adibuat adalah 80,8.

Dari data keseluruhan yang penulis dapati menunjukkan bahwa SMPN 2 Sawan dalam mewujudkan PPKn sebagai pendidikan demokrasi sudah ber Nilai *Positif* terhadap peserta didik di SMPN 2 Sawan hal ini dapat dibuktikan dari data yang di temukan penulis cukup baik. Dalam banyak cara yang dilakukan oleh para guru dalam mengimplementasikan serta mengemban pendidikan demokrasi kepada peserta didik SMPN 2 Sawan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arifin, S. 1999. Etika Pluralisme dan Konstruksi Masyarakat Madani. *Republika*: 14 Mei 1999.
- Asy'ari, A. 1999. Masalah Dilematika dalam Membangun Masyarakat Madani. *Republika*: 23 Pebruari 1999.
- Bahmueller, C.F. 1997. A Framework for Teaching Democratic Citizenship: An International Project. *In The International Journal of Social Education*, 12, 2.
- Bertens, K. 1999. Masyarakat Madani dan Prinsip Subsidiaritas. *Suara Pembaharuan*: 17 Juli 1999.
- CCE. 1997. *Foundations of Democracy; Teachers' Guide*. Calabasas; Center for Civic Education.
- 1996. *Foundations of Democracy: Authority, Privacy, Responsibility, and Justice*. Calabasas: Center for Civic Education.
- CICED. 2000a. The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education. *A National Survey Report*. Bandung: CICED.
- 2000b. The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education. *An International Seminar*
- Civitas International. 1998. International Partnership for Civic Awareness. *A Conference Report*. Strasbourg: Civitas International.
- Dawson, R.A., P. Kenneth, dan K.S. Dawson. 1979. *An Analysis Study of Political Socialization*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Depdiknas. 2008. *Pembelajaran Inovatif dan Partisipatif*. Jakarta: Depdiknas
- Hornby, A.S. et al. 1962. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Huntington, S.P. 1991. Gelombang Demokrasi Ketiga. Terjemahan dari *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Madjid, N. 1999. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi. *Republika*: 10 Agustus 1999.
- Mansoer, H. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Depdiknas.
- Miles, M.B. dan Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah). Jakarta: UI Press.
- Muchson. 1991. Kesadaran Politik Siswa-siswa SMA di Wilayah Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Mulder, N. 1998. Masyarakat Madani tak Bisa Andalkan Nilai Jawa. *Kompas*: 20 Nopember 1998.
- Murtiyoso. 1990. Pengaruh Keluarga, Sekolah, dan Media Massa terhadap Efikasi Politik. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fisipol UGM.

- O'neil, W.F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. O.I.Naomi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanusi, A. (1999). Model Pendidikan Kewargaan Negara Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. *Makalah dalam Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.
- (1998). Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi. *Makalah Semlok Bersama IKIP Bandung – FKIP UT – Kanwil Depdikbud Jawa Barat tentang Pendidikan Politik, Kenegaraan, dan Hukum Persekolahan Menyongsong Era Abad XXI*.
- Sardiman, AM. 2008. Spiritualisme dalam Pembelajaran IPS. *Makalah*. Disampaikan pada seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-44 UNY.
- Sihabuddin, R. 2002. Pendidikan Demokrasi melalui Pengelolaan Asertivitas dan Atribusi Siswa terhadap Sikap dan Perilaku Berdemokrasi. *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Bandung: UPI.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suara Pembaharuan. 1999. Masyarakat Madani Tercermin dalam Kedaulatan Rakyat. *Suara Pembaharuan*: 21 Juni 1999.
- Sudiatmaka, K. (2001). Pendidikan Politik di Kalangan Perempuan Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Studi Sosial-Budaya di Desa Adat Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng). *Tesis* (Tidak dipublikasikan). Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Sukadi. 2006. Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan IPS di DMA Negeri 1 Ubud). *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Bandung: UPI Bandung.
- 1994. Tingkat Religiusitas dan Nilai Modern Siswa SMTA di Bali: Studi tentang Kontribusi Faktor-faktor Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, dan Interaksi Remaja dengan Wisatawan. *Tesis* (Tidak dipublikasikan). Jakarta: Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta
- AryaSunu, I Gusti Ketut. 2015. *Menajemen kelas: Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran Dipeendidikan Formal*. Yogyakarta: Media Akademi
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agus, Irianto, *Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasinya*.
- Arif. (2017). "Hubungan interaksi edukatif dan kedisiplinan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota Semarang". Tersedia pada https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+tentang+korelasi+antara+disiplin+siswa+dalam+mematuhi+tata+tertib+sekolah+dengan+hasil+belajar+PPKn&btnG=(diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 10.16 Wita)
- Basri, H. (1994). *Remaja Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bisri. (2019). "Hubungan disiplin dan gaya belajar dengan hasil belajar muatan pembelajaran PPKn siswa kelas IV SD Gugus Larasati Kota Semarang". Tersedia pada

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+tentang+korelasi+antara+disiplin+siswa+dalam+mematuhi+tata+tertib+sekolah+dengan+hasil+belajar+PPKn&btnG= (diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 10.16 .